



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 10 Oktober 2016

Halaman: 2

Bisa Belanja Selain Beras

JOGJA - Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kota Jogja segera diganti dengan uang. Bentuknya berupa uang nontunai yang akan diberikan tiap bulan untuk dibelanjakan di e-warong.

"Kota Jogja merupakan salah satu dari 44 kota di Indonesia yang akan mengawali pelaksanaan program bantuan pangan nontunai," ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Hadi Muchtar kemarin (9/10). Pergantian itu dipe-runtukkan pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS).

Hadi mengatakan besaran bantuan yang akan diterima Rp110.000 per bulan. Bantuan itu dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di e-warong yang dikelola kelompok usaha bersama program keluarga harapan di wilayah. "Tidak hanya untuk berbelanja beras, tetapi juga kebutuhan lain," katanya.

Di Kota Jogja sendiri terdapat 16.031 kepala keluarga penerima manfaat program raskin. Sebanyak 3.302 di antaranya juga menjadi penerima program keluarga harapan. Hadi mengatakan data penerima raskin secara lengkap sudah harus dikirim ke pemerintah pusat paling lambat akhir Desember sebagai dasar untuk pembuatan kartu keluarga sejahtera yang juga bisa berfungsi sebagai kartu ATM itu. Sementara untuk untuk keberadaan e-warong, kemungkinan

**Tidak hanya untuk
berbelanja beras,
tetapi juga
kebutuhan lain"**

HADI MUCHTAR
Kepala Dinsosnakertrans Kota
Jogja

akan ditambah sehingga tersebar di seluruh kecamatan. Saat ini di Kota Jogja baru terdapat satu e-warong di Bintaran. Satu e-warong diharapkan mampu melayani sekitar 1.000 pemegang KKS. "Targetnya ditambah menjadi 15 e-warong karena Kecamatan Umbulharjo dimungkinkan membutuhkan dua e-warong," ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekprov DIJ Sulistyono mengakui selama ini penyaluran program raskin masih dinilai kurang tepat sasaran. Hal itu bisa didata kembali agar pemberian program nontunai diarahkan tepat sasaran. Pendataan penerima program bisa dilakukan sambil berjalan diperbaiki. Data bisa diperbarui melalui musyawarah desa jika ada yang tidak pas sebelum daerah mengusulkan ke pusat. "Data lebih dimudahkan untuk diperbarui saat ini," ungkapnya. (pra/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005